

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. JUDUL**

Protes Panwascam terhadap KPU Bandar Lampung terkait Kasus Kelebihan Pencetakan Surat Suara.

### **B. SUB JUDUL**

Studi Analisis Isi Pemberitaan Harian Umum Lampung Post periode Mei 2010 – Juni 2010 tentang Protes Panwascam terhadap KPU Bandar Lampung terkait Kasus Kelebihan Pencetakan Surat Suara Menjelang Pilkada Bandar Lampung 2010.

### **C. LATAR BELAKANG**

Secara institusional, KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang ada sekarang ini merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi pada tahun 1998<sup>1</sup>. KPU pertama dibentuk berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999 yang dilantik oleh Presiden yang sedang menjabat saat itu, yaitu BJ Habibie. KPU pertama mempunyai 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana Pemilu sangat penting. Selain menjadi ‘motor penggerak’ KPU, para anggota mampu membuat

---

<sup>1</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=32&Itemid=50](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=50), diakses tanggal 24 Februari 2011 pukul 13:21 wib.

KPU memiliki kredibilitas dan integritas di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

KPU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. KPU juga merencanakan dan anggaran, serta menetapkan dan menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Pedoman tata kerja tersebut bersifat teknis untuk setiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>.

KPU Bandar Lampung termasuk salah satu KPU Kabupaten/Kota yang bernaung di bawah KPU Lampung (provinsi). KPU Bandar Lampung mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2010, serentak di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Surat suara menjadi salah satu keperluan logistik yang penting dalam suatu penyelenggaraan Pilkada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi surat suara yaitu surat pemilih<sup>3</sup>. Surat suara tersebut nantinya akan digunakan oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT memiliki hak pilih sepenuhnya untuk memilih pasangan mana yang sesuai dan pantas menjabat sebagai Bupati/Walikota.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hal 1108.

Berdasarkan pada pasal 87 ayat (1) UU No 32/2004 tentang Pemda, pencetakan surat suara berpedoman pada DPT yang kemudian akan ditambah dengan cadangan sebesar 2,5%. Jika mengacu pada DPT, seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 627.954 ditambah cadangan 2,5% (15.699) hasilnya sebanyak 643.653 lembar. Sementara jumlah surat suara yang dicetak oleh CV Tawakal sebanyak 760.236 lembar<sup>4</sup>. Selisih jumlah surat suara yang sangat jauh berbeda ini terkuak saat Panwascam melakukan tugasnya untuk mengawasi CV Tawakal, tempat surat suara tersebut dicetak.

Mengetahui adanya kejanggalan tersebut, Panwascam kemudian melaporkan adanya 'surat suara siluman' itu kepada anggota Panwas Pilkada Bandar Lampung. Dari pihak CV Tawakal mengatakan bahwa pencetakan surat suara sebanyak itu atas permintaan KPU Bandar Lampung. Anggota Panwas Pilkada akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan meminta klarifikasi dari pihak ketua KPU Bandar Lampung<sup>5</sup>.

Pada salah satu *headline* Lampung Post, ada pernyataan bahwa Ketua KPU, As'ad Muzammil melemparkan kesalahan kepada pers terkait pemberitaan KPU Bandar Lampung tentang sengketa kelebihan pencetakan surat suara<sup>6</sup>. Berikut kutipan berita yang terbit pada tanggal 31 Mei 2010 dengan judul "*Ketua KPU Salahkan Pers*":

---

<sup>4</sup> Lampung Post. 15 Mei 2010. KPU Bandar Lampung Mengada-ada.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Lampung Post. 31 Mei 2010. Ketua KPU Salahkan Pers.

*“Ketua Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung As’ad Muzammil terkesan panik menghadapi kasus kelebihan cetak surat suara hingga 116.583 lembar (17%). Ia malah melemparkan kesalahan pada pers.*

*...  
Justru DK (Dewan Kehormatan) akan menguak kebenaran. Tidak main langsung vonis seperti berita-berita ente. Ente kan pernah sekolah dan kuliah, tau kalau ada asas praduga tak bersalah...,” tulis As’ad dalam SMS-nya tanpa memerinci berita edisi hari apa dan tanggal berapa. (Lampung Post, 31 Mei 2010)*

Padahal pada pemberitaan sebelumnya, pers tidak pernah memvonis KPU Bandar Lampung sebagai pihak yang bersalah. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh wartawan Lampung Post, KPU Bandar Lampung telah melanggar tiga aturan dan empat asas dalam UU tentang Pemda. Menanggapi sikap Ketua KPU Bandar Lampung tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) angkat bicara dan menyatakan bahwa sikap KPU tersebut tidak elegan dan sebaiknya menggunakan hak jawab.

Sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan fungsi media dan masalah pemberitaan berimbang dan kode etik jurnalistik pada umumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UAJY Antariksa Manikkusuma Ekoputra (2010) yang melihat etika jurnalistik dalam pemberitaan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur putaran II Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan Harian Surya, surat kabar regional di Jawa Timur sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran etika, dilihat dari beberapa indikator yang digunakan yaitu akurasi berita, privasi berita, diskriminasi berita, objektivitas berita,

dan tanggung jawab berita. Persentase cukup besar terdapat pada indikator objektivitas berita yang menunjukkan bahwa 33% berita tersebut tidak objektif<sup>7</sup>.

Penelitian lain dilakukan oleh Rosyana Dwiuniarti (2010) dengan judul penelitian Objektivitas Pemberitaan KPK dan POLRI dalam Kasus Bibit-Chandra. Penelitian ini menggunakan dua surat kabar sebagai objek penelitiannya, yaitu SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat telah menerapkan prinsip *balance* dengan cukup baik karena sebagian besar beritanya (SKH Kompas 65%, Kedaulatan Rakyat 66 %) menggunakan tipe liputan multi sisi yang memberikan porsi seimbang dalam pemberitaan kepada semua pihak atau aktor dengan berbagai pandangan yang berbeda<sup>8</sup>. Selain itu, dalam kategori arah pemberitaan SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat cenderung tidak bersikap netral tetapi lebih memihak pada satu pihak saja yaitu KPK (SKH Kompas 64 %, Kedaulatan Rakyat 50%)<sup>9</sup>.

Harian Lampung Post merupakan surat kabar lokal terbesar di provinsi Lampung yang pertama kali terbit sejak 10 Agustus 1974 dan bergabung bersama Media Group<sup>10</sup>. Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi bersama dengan adanya pemberitaan tentang permasalahan kelebihan pencetakan surat suara oleh KPU Bandar Lampung, Harian Lampung Post diharapkan dapat memberikan informasi

---

<sup>7</sup> Antariksa Manikkusuma Ekoputra. 2010. *Studi Analisis Isi Pemberitaan Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam Rubrik menuju Grahadi di Harian Surya tahun 2008*. Skripsi. UAJY, hal 84.

<sup>8</sup> Rosyana Dwiuniarti. 2010. *Objektivitas Pemberitaan KPK dan POLRI dalam Kasus Bibit-Chandra*. Skripsi. UAJY, hal 146.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Sumber dari Rakata Institute, dipublikasikan oleh Lampung Post melalui situsnya <http://lampungpost.com/cetak/main.php> diakses tanggal 10 Desember 2010 pukul 16:55 wib.

yang akurat khususnya bagi masyarakat Bandar Lampung. Hal ini tentunya berkaitan dengan adanya proses Pilkada Bandar Lampung 2010 maka segala pemberitaan tentang adanya permasalahan kelebihan surat suara tersebut, mampu menambah informasi agar masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada Bandar Lampung 2010. Melihat adanya pemberitaan yang diterbitkan oleh Harian Umum Lampung Post<sup>11</sup>, yang menyebutkan bahwa pers dinilai menjatuhkan vonis kepada salah satu pihak tertentu, peneliti bermaksud ingin melihat bagaimana kecenderungan ketidakberpihakan dalam pemberitaan Harian Umum Lampung Post terkait dengan kasus tersebut.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana kecenderungan ketidakberpihakan dalam pemberitaan Harian Umum Lampung Post tentang protes Panwascam terhadap KPU Bandar Lampung terkait kasus kelebihan pencetakan surat suara, dilihat dari sudut pandang Teori Pers Tanggungjawab Sosial?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan ketidakberpihakan dalam pemberitaan Harian Umum Lampung Post tentang protes Panwascam terhadap KPU Bandar Lampung terkait kelebihan pencetakan surat suara, dilihat dari sudut pandang Teori Pers Tanggungjawab Sosial.

---

<sup>11</sup> Lampung Post. 31 Mei 2010. Ketua KPU Salahkan Pers.

## **F. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pengembangan penelitian studi komunikasi khususnya jurnalistik, tentang analisis isi berita dalam media surat kabar.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi media cetak Harian Lampung Post dan KPU Bandar Lampung terkait dengan pemberitaan kelebihan pencetakan surat suara menjelang Pilkada Bandar Lampung 2010.

## **G. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori digunakan sebagai landasan teori bagi peneliti untuk mempermudah dalam memahami data penelitian. Kerangka teori membantu memperkuat penafsiran peneliti agar dapat dipahami kebenarannya oleh khalayak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **Teori Pers Tanggungjawab Sosial**

Teori tanggungjawab sosial muncul melalui pemikiran beberapa tokoh, salah satunya adalah John Milton. Teori tanggungjawab sosial sebagian besar merupakan kritik dan modifikasi dari teori libertarian<sup>12</sup>. Namun, teori ini terbentuk dikarenakan adanya dorongan dari Komisi Kebebasan Pers sebagai sebuah teori baru dan terpadu.

---

<sup>12</sup> Sanjaya, Putu Laxman (alihbahasa). 1986. *Empat Teori Pers*. Jakarta : PT Intermasa, hal 2.

Di bawah konsep libertarian, fungsi media komunikasi massa adalah memberi informasi dan menghibur. Para pembuat teori libertarian berasumsi bahwa dari sekian banyak suara-suara pers, beberapa informasi yang sampai pada khalayak bisa salah dan beberapa opini menjadi tidak sehat. Media massa diharapkan dapat menjadi instrumen prinsipil dalam pendidikan dan harus menjadi saluran yang digunakan masyarakat untuk menerima informasi<sup>13</sup>.

Teori tanggungjawab sosial memiliki asumsi utama bahwa di dalam kebebasan terkandung suatu tanggungjawab dan pers atau media massa memiliki tanggungjawab terhadap khalayak untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam komunikasi massa<sup>14</sup>. Fungsi media massa di bawah teori tanggungjawab sosial sama dengan fungsi media massa dalam teori libertarian. Fungsi-fungsi tersebut yaitu<sup>15</sup> :

1. Menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
3. Bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.
4. Melayani sistem ekonomi melalui medium periklanan.
5. Menyediakan hiburan.

Dalam kehidupan pers juga dipengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi, industri dan perubahan sosial. Perkembangan teknologi pada akhirnya menghasilkan media baru, seperti film, radio, televisi. Media cetak sudah lebih dulu muncul. Wartawan-wartawan surat kabar berpendapat bahwa pekerjaan mereka

---

<sup>13</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 64.

<sup>14</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 83.

<sup>15</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 84.

membutuhkan sikap netral, karena pendapat atau opini wartawan secara tegas harus dipisahkan dari sebuah berita<sup>16</sup>.

Teori tanggungjawab sosial sebagian besar merupakan kritik dan modifikasi dari teori libertarian. Dasar dari sebagian besar kritik terhadap surat kabar dibentuk oleh Will Irwin pada tahun 1911<sup>17</sup>. Irwin melihat bahwa pengaruh surat kabar telah berpindah dari tajuk rencana menjadi kolom-kolom berita dan sifat komersial surat kabar menjadi penyebab kemunduran kualitas surat kabar. Ketika periklanan menjadi sesuatu yang penting bagi surat kabar, hal ini terlihat sebagai kekuatan jahat yang menyebabkan redaksi menyingkirkan berita yang tidak menguntungkan. Situasi seperti ini menjadi ancaman bagi kebebasan arus berita.

Menjelang abad 19, jurnalisme mulai menjadi daya tarik khususnya bagi kaum terpelajar<sup>18</sup>. Beberapa dari mereka membentuk kode etik untuk pekerja mereka sendiri. Kode etik dari berbagai media menunjukkan adanya perubahan dalam beberapa hal, seperti hakikat manusia dan prinsip-prinsip tingkah laku yang etis. *Canon of Journalism* merupakan kode etik pertama yang diciptakan pada tahun 1923<sup>19</sup>. *Canon of Journalism* tidak terlihat menyimpang dari teori libertarian dibandingkan dengan kode etik untuk media massa lainnya, seperti film, radio dan televisi. Menurut *Canon of Journalism*, surat kabar sebagai salah satu jenis media massa sebaiknya menyajikan pemberitaan yang dapat bertanggungjawab terhadap

---

<sup>16</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 69.

<sup>17</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 90.

<sup>18</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 94.

<sup>19</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 97.

kesejahteraan masyarakat, kejujuran, tidak memihak, seimbang, dan menghormati kehidupan pribadi setiap orang.

Komisi Hutchins untuk kebebasan pers dibentuk pada tahun 1942 dan mengeluarkan laporan atas temuannya pada tahun 1947. Komisi kebebasan pers sebagai pendorong terbentuknya teori ini, merumuskan 5 hal yang merupakan ukuran bagi pelaksanaan kegiatan pers<sup>20</sup>. Pertama, pers dituntut untuk menyajikan informasi secara jujur, mendalam, akurat, tidak memihak serta menyajikan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat. Kedua, pers harus menjadi “sebuah forum pertukaran komentar dan kritik”. Pers sebaiknya menyajikan informasi dari semua pandangan dan mencantumkan identitas dari setiap sumber berita.

Ketiga, pers sebaiknya menonjolkan gambaran yang representatif dari kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat, misalnya kelompok China atau kelompok Negro. Hal ini dikarenakan setiap orang cenderung membuat keputusan sesuai dengan citra yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Suatu penggambaran akan salah ketika menyimpang dari penilaian yang akurat, maka informasi sebaiknya dilaporkan secara jujur dan tidak memihak. Rumusan ketiga ini berkaitan erat dengan dua rumusan sebelumnya.

Keempat, pers hendaknya bertanggungjawab dalam penyajian dan penguraian tujuan serta nilai-nilai masyarakat. Dan rumusan terakhir, pers hendaknya memberikan berita-berita yang luas. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan diberi informasi, sehingga harus ada distribusi berita secara luas.

---

<sup>20</sup> Sanjaya. *Op.cit.*, hal 99-105.

Teori pers tanggung jawab sosial menekankan kebutuhan terhadap pers independen yang mengawasi institusi sosial lainnya serta memberikan laporan yang objektif dan akurat. Secara keseluruhan, prinsip dasar dari teori tanggungjawab sosial adalah wartawan dan media secara profesional dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi dengan menetapkan standar yang tinggi secara benar, tepat, objektif dan seimbang<sup>21</sup>.

## **H. DEFINISI KONSEP**

### **1. Berita**

Aktivitas atau proses utama dari jurnalistik adalah menghasilkan berita. Berita merupakan bagian dari komunikasi yang membuat kita terus memperoleh informasi tentang pergantian peristiwa, isu, dan tokoh di dunia luar<sup>22</sup>. Berita adalah laporan peristiwa yang baru terjadi atau peristiwa aktual yang dilaporkan di media massa ; fakta yang menarik perhatian atau gagasan yang perlu disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Dengan melaporkan berita, media massa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan.

Suatu peristiwa dapat diberitakan apabila tersedia sejumlah fakta yang cukup tentang peristiwa itu. Mencari dan mengumpulkan fakta dari suatu obyek realitas

---

<sup>21</sup> McQuail, Denis. 1991. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga, hal 117.

<sup>22</sup> Kovach, Bill., dan Tom Rosenstiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta : Yayasan Pantau, hal 16.

adalah kegiatan pokok dalam profesi jurnalistik<sup>23</sup>. Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu<sup>24</sup>.

#### a. Kelengkapan Berita

Dalam penulisan suatu berita, pola 5W+1H menjadi pola umum yang berfungsi sebagai kelengkapan berita. Suatu peristiwa yang diberitakan, dapat diungkapkan melalui pertanyaan pokok jurnalistik (5W+1H) yaitu : apa (*what*), siapa (*who*), mengapa (*why*), di mana (*where*), bilamana (*when*), dan bagaimana (*how*)<sup>25</sup>. Berikut ini adalah penjelasan unsur-unsur diatas :

##### 1) Apa yang terjadi?

Pertanyaan *apa* yang terjadi menimbulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku atau korban akan mulai dikumpulkan oleh wartawan. Unsur *apa* menjadi penting untuk diketahui karena unsur tersebut dapat mengungkapkan hal yang penting atau menarik dari suatu peristiwa.

##### 2) Siapa yang terlibat dalam kejadian?

*Siapa* merupakan pertanyaan yang akan mengundang fakta yang berkaitan dengan *siapa* orang yang terlibat dalam peristiwa. Orang tersebut sebaiknya dapat

---

<sup>23</sup> Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta : Kanisius, hal 53.

<sup>24</sup> Siregar. *Op.cit.*, hal 102.

<sup>25</sup> Siregar. *Op.cit.*, hal 52.

diidentifikasi nama, umur, pekerjaan, dan atribut lain yang diperlukan. Semakin banyak fakta yang terkumpul terkait dengan *siapa* orang yang terlibat, maka akan semakin lengkap berita yang ditulis.

3) *Mengapa* (apa yang menyebabkan) kejadian itu terjadi?

*Mengapa* merupakan pertanyaan yang akan mengundang jawaban latar belakang dari suatu tindakan atau penyebab suatu kejadian yang telah diketahui unsur *apa-nya*. Sebagai contoh, jika *apa-nya* adalah kasus skandal surat suara Pilkada Bandar Lampung, maka *mengapa-nya* adalah hal-hal yang menyebabkan kasus skandal surat suara itu terjadi.

4) *Di mana* kejadian itu?

*Dimana* merupakan pertanyaan yang menyangkut tempat kejadian. Nama tempat sebaiknya dapat disebutkan dengan jelas sehingga khalayak mendapat gambaran tempat yang disebutkan. Nama tempat berkaitan dengan unsur *proximity* (kedekatan geografis)

5) *Bilamana* (kapan) kejadian itu?

Pertanyaan *bilamana* akan menyangkut tentang waktu kejadian. Hal ini berkaitan dengan konsep yang terkandung di dalam unsur *timeliness* dalam kriteria kelayakan berita yang berarti aktualitas dan kebaruan. Waktu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, akan menjadi fakta dalam sebuah berita. Namun, biasanya waktu yang sudah lama terjadi tidak memiliki nilai berita lagi. Maka jika akan diberitakan, harus dicari nilai berita yang lain dalam kejadian itu.

6) *Bagaimana* kejadiannya?

*Bagaimana* merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan proses kejadian yang akan diberitakan. Jawaban dari pertanyaan *bagaimana* akan menjadi daya tarik berita.

**b. Sumber Berita**

Dalam melakukan peliputan berita, wartawan memperoleh informasi dari sumber berita. Menurut Sumadiria, berdasarkan sifatnya sumber berita terbagi dalam dua kelompok<sup>26</sup>. Kelompok pertama adalah sumber berita formal atau resmi. Sumber berita formal atau resmi adalah sumber berita yang dikenal secara umum terutama oleh pers. Misalnya pusat kegiatan pemerintahan seperti kantor gubernur, bupati atau wali kota, kantor polisi dan pejabat-pejabat penting itu sendiri. Kelompok kedua adalah sumber berita informal atau tidak resmi, yaitu sumber berita yang diperoleh dari anggota masyarakat atau organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, para ahli atau ilmuwan dan juga para peneliti lapangan.

Sumber-sumber berita seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat diseleksi menurut cocok atau tidak cocok mereka untuk mewakili sebuah isu atau peristiwa. Beberapa sumber berita dipercaya karena posisi jabatan atau keahlian mereka, seperti pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah memiliki status sebagai sumber berita karena adanya tanggung jawab mereka terhadap publik. Maka, wartawan dapat menggunakan atau memilih sumber tersebut sebagai sumber yang berwenang dan dapat dipercaya.

---

<sup>26</sup> Sumadiria. *Op.cit.*, hal 97.

Setiap surat kabar selalu ingin menampilkan informasi yang lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih akurat dibandingkan dengan surat kabar yang lain terlebih di masa persaingan media yang semakin ketat ini. Suatu peristiwa dapat menjadi sebuah berita karena adanya interaksi antara media massa dengan masyarakat. Media membutuhkan masyarakat sebagai sarana pembentukan ideologi dan sosialisasi<sup>27</sup>. Sedangkan masyarakat membutuhkan media untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhannya akan informasi suatu peristiwa yang terjadi di dalam atau di luar lingkungan mereka.

Sama halnya dengan rumusan yang dicetuskan oleh Komisi Kebebasan Pers dalam teori tanggungjawab sosial. Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban untuk menyajikan informasi yang lengkap, mendalam, dan akurat kepada masyarakat. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab<sup>28</sup>.

## **I. KERANGKA KONSEP**

Kerangka konsep akan memuat dimensi, unit analisis, kategorisasi dan sub kategorisasi. Unit analisis merupakan keseluruhan satuan atau unit yang akan

---

<sup>27</sup> [www.digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/5311301200508521](http://www.digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/5311301200508521), diakses tanggal 01 Juli 2011 pukul 11:33 wib.

<sup>28</sup> McQuail. *Op.cit.*, hal 117.

diteliti<sup>29</sup>. Masing-masing unit analisis akan digunakan peneliti untuk menganalisis berita seputar kasus skandal surat suara. Dimensi yang digunakan oleh peneliti mengacu pada 5 rumusan Komisi Kebebasan Pers sebagai ukuran bagi pelaksanaan kegiatan pers, yaitu :

1. Pers dituntut untuk menyajikan informasi secara jujur, mendalam, akurat, tidak memihak serta menyajikan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat.
2. Pers sebaiknya menyajikan informasi dari semua pandangan dan mencantumkan identitas dari setiap sumber berita.
3. Pers sebaiknya menonjolkan gambaran yang representatif dari kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat.
4. Pers hendaknya bertanggungjawab dalam penyajian dan penguraian tujuan serta nilai-nilai masyarakat.
5. Pers hendaknya memberikan berita-berita yang luas. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan diberi informasi, sehingga harus ada distribusi berita secara luas.

Kemudian dari lima rumusan tersebut, peneliti akan menggunakan dua rumusan yang dirasa relevan dengan penelitian ini sehingga mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Dua rumusan tersebut, yaitu : (1) *pers dituntut untuk menyajikan informasi secara jujur, mendalam, akurat, tidak memihak serta menyajikan fakta*

---

<sup>29</sup> Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta : Rajawali Pers, hal 65.

*sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat dan (2) pers sebaiknya menyajikan informasi dari semua pandangan dan mencantumkan identitas dari setiap sumber berita.*

TABEL 1.1  
Unit Analisis dan Kategori Penelitian

<b>Dimensi</b>	<b>Unit Analisis</b>	<b>Kategorisasi</b>
Pers dituntut untuk menyajikan informasi secara jujur, mendalam, akurat, tidak memihak serta menyajikan fakta sebagai fakta, dan pendapat sebagai pendapat.	Jenis Fakta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakta sosiologis</li> <li>2. Fakta psikologis</li> </ol>
	Kelengkapan Unsur 5W+1H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memuat 5W+1H dengan lengkap</li> <li>2. Memuat 5W+1H dengan tidak lengkap</li> </ol>
	Arah Pemberitaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan gambaran positif terhadap KPU Bandar Lampung</li> <li>2. Memberikan gambaran positif dan negatif terhadap KPU Bandar Lampung (seimbang)</li> <li>3. Memberikan gambaran negatif terhadap KPU Bandar Lampung.</li> </ol>
Pers sebaiknya menyajikan informasi dari semua pandangan dan mencantumkan identitas	Tipe Liputan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Multi sisi</li> <li>2. Dua sisi</li> <li>3. Satu sisi</li> </ol>
	Pernyataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan</li> </ol>

dari setiap sumber berita	Narasumber	2. Tidak relevan
---------------------------	------------	------------------

## J. DEFINISI OPERASIONAL

Unit analisis dan kategorisasi tersebut merupakan acuan peneliti dalam melakukan analisis. Pemaparan terhadap operasional data diperlukan sebagai penjelasan dari unit analisis dan kategori yang sudah ditetapkan berdasarkan aspek objektivitas pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan Harian Umum Lampung Post dalam pemberitaan tentang protes Panwascam terhadap kelebihan pencetakan surat suara oleh KPU Bandar Lampung, dilihat dari sudut pandang teori pers tanggungjawab sosial.

Secara profesional dan bertanggungjawab, dalam teori pers tanggungjawab sosial media menekankan keseimbangan dan kenetralan dalam penyajian informasi, sehingga tidak ada kecenderungan pemberitaan terhadap satu pihak saja. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing untuk unit analisis yang mengacu pada rumusan Komisi Kebebasan Pers dalam teori pers tanggung jawab sosial.

### **Rumusan Komisi Kebebasan Pers**

1. “Pers dituntut untuk menyajikan informasi secara jujur, mendalam, akurat, tidak memihak serta menyajikan fakta sebagai fakta, dan pendapat sebagai pendapat”.
  - a. Jenis fakta dalam berita melihat apakah berita tersebut disajikan berdasarkan fakta atau pendapat. Jenis fakta dikategorikan dengan :

1) Fakta sosiologis, berita tersebut disusun berdasarkan informasi yang berupa peristiwa, kejadian nyata, dan fakta.

2) Fakta psikologis, berita tersebut disusun berdasarkan interpretasi subjektif yang berupa opini dalam bentuk pernyataan, penilaian dan pendapat sumber berita. Misalnya terdapat kata-kata seperti : tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan atau kesannya, diramalkan, seolah, agaknya, sayangnya dan kata-kata opini lainnya.

b. Kelengkapan unsur adalah nilai berita berdasarkan kelengkapan unsur berita, yaitu 5W (*what, where, when, why, who*) dan 1H (*how*). Kelengkapan unsur berita dapat dikategorikan dengan :

- 1) Memuat 5W+1H dengan lengkap
- 2) Memuat 5W+1H dengan tidak lengkap

c. Arah pemberitaan

Menunjuk pada bagaimana arah pemberitaan yang disajikan harian Lampung Post. Arah sikap positif adalah bila ada pernyataan yang mendukung, sikap netral bila ada pernyataan yang tidak bersikap memihak di satu pihak saja, dan sikap negatif bila ada pernyataan yang ditampilkan tidak mendukung.

- 1) Memberikan gambaran positif terhadap KPU Bandar Lampung.
- 2) Memberikan gambaran positif dan negatif terhadap KPU Bandar Lampung (seimbang).

- 3) Memberikan gambaran negatif terhadap KPU Bandar Lampung.
- 
2. “Pers sebaiknya menyajikan informasi dari semua pandangan dan mencantumkan identitas dari setiap sumber berita”.
    - a. Tipe liputan merupakan strategi peliputan yang meliputi :
      - 1) Multi sisi (*all sides*), jika melibatkan pendapat lebih dari dua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung.
      - 2) Dua sisi (*cover both sides*), jika melibatkan pendapat dari dua pihak dan atau berlawanan.
      - 3) Satu sisi, jika melibatkan pendapat dari satu pihak atau kepentingan saja.
    - b. Pernyataan Narasumber
      - 1) Relevan, jika pernyataan narasumber terdapat dalam pemberitaan yang berhubungan langsung dengan tema dan fokus berita. Hal ini dimaksudkan pernyataan tersebut menunjuk pada *headline*, *lead*, atau paragraf dan kalimat sebelum atau sesudah pernyataan itu ditempatkan.
      - 2) Tidak relevan, jika pernyataan narasumber tidak terdapat dalam pemberitaan yang berhubungan langsung dengan tema dan fokus berita (tidak menunjuk pada *headline*, *lead*, paragraf dan kalimat sebelum atau sesudah pernyataan itu ditempatkan.

## K. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis dan Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi. Menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Prinsip analisis isi berdasarkan definisi di atas adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

a. Prinsip sistematis

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang di analisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.

b. Prinsip objektif

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama walaupun risetnya beda.

c. Prinsip kuantitatif

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip yang menggunakan metode deduktif.

d. Prinsip isi yang nyata

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak.

Menurut Berelson dan Kerlinger, metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis isi komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak<sup>31</sup>. Segala proses analisis harus tersusun melalui proses sistematis, mulai dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya maupun kategori yang dipakai untuk menganalisis. Objektif yaitu periset harus mengesampingkan faktor-faktor yang bersifat subjektif

---

<sup>30</sup> Kriyantono, Rahmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana, hal 230.

<sup>31</sup> Kriyantono. *Op.cit* hal 231.

sehingga hasil analisis benar-benar objektif dan ketika dilakukan riset lagi oleh orang lain, maka hasilnya relatif sama. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan bersifat deskriptif. Kuantitatif yaitu mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan<sup>32</sup> dan deskriptif yaitu bahwa peneliti memiliki konsep dan kerangka konseptual yang digunakan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat.

Menurut Babbie, ada beberapa kelebihan dalam analisis isi, yaitu<sup>33</sup> :

- a) Hemat waktu, tenaga, dan biaya. Dengan metode analisis isi cukup dengan memanfaatkan surat kabar, majalah, acara televisi atau media yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi biaya dapat diminimalisasi dan dari segi waktu dapat diprediksi kapan penelitian akan diselesaikan.
- b) Analisis isi relatif aman untuk dilakukan karena memiliki resiko kegagalan yang minim. Resiko untuk mengulang penelitian proses pengumpulan data sangat kecil, sehingga tidak banyak kehilangan waktu, tenaga, dan biaya.
- c) Objek penelitian yang digunakan dalam analisis isi tidak terikat oleh waktu. Artinya kita dapat meneliti objek penelitian dalam jangka waktu yang sangat panjang, misalnya tema lagu-lagu yang populer sejak tahun 50-an sampai 2000-an atau *headline news* yang dimuat di surat kabar dalam rentang waktu satu tahun.

## 2. Objek Penelitian

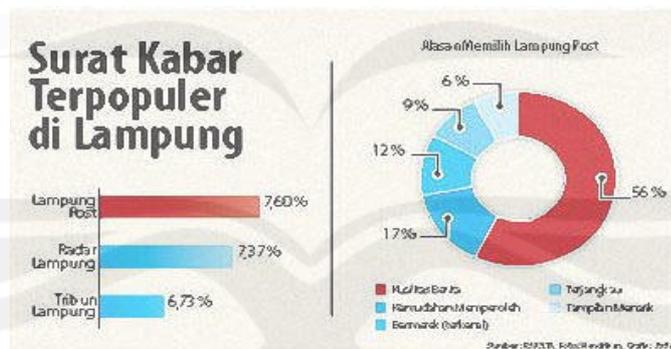
---

<sup>32</sup> Kriyantono. *op.cit.*, hal 230.

<sup>33</sup> Martono. *Op.cit.*, hal 97.

Definisi objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah<sup>34</sup> : 1) hal perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. 2) benda/hal, dsb. yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dsb. Dalam analisis isi, objek penelitian adalah teks, pesan, atau media itu sendiri<sup>35</sup>. Objek penelitian ini adalah semua pemberitaan KPU Bandar Lampung mengenai skandal surat suara dalam Pilkada 2010 di Harian Umum Lampung periode Mei 2010 sampai dengan Juni 2010. Hal ini dikarenakan Harian Umum Lampung Post sebagai surat kabar yang beroplak lokal dan terbesar di provinsi Lampung akan memiliki kedekatan antara pembaca dengan pemberitaan seputar KPU Bandar Lampung yang terkait dengan kasus skandal surat suara.

GAMBAR 1  
GRAFIK HASIL SURVEI MEDIA MASSA



Sumber : <http://lampungpost.com/cetak/main.php> diakses tanggal 10 Desember 2010 pukul 16:55 wib

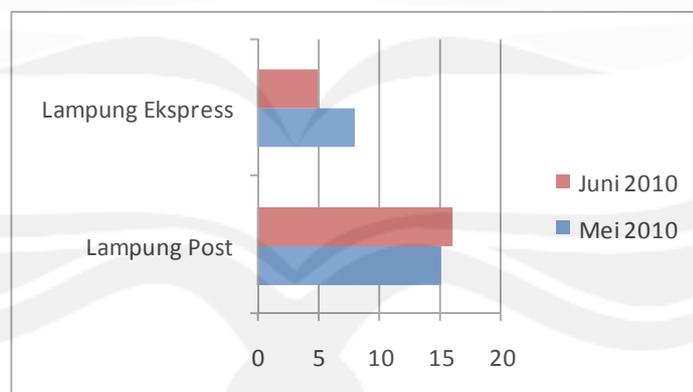
### 3. Populasi dan Sampel

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka, hal 698.

<sup>35</sup> Kriyantono. *op.cit.*, hal 233.

Menurut Nanang, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit dalam ruang lingkup yang diteliti<sup>36</sup>. Populasi ditentukan pada berita-berita mengenai KPU Bandar Lampung terkait dengan kasus skandal surat suara dalam *Harian Lampung Post* pada rentang waktu di bulan Mei 2010 sampai dengan Juni 2010. Pemilihan *time frame* tersebut dikarenakan oleh frekuensi kemunculan seputar pemberitaan KPU Bandar Lampung terkait skandal surat suara yang cukup tinggi dibandingkan dengan *Harian Lampung Ekspres* pada rentang waktu yang sama.

Grafik 1  
Perbandingan Jumlah Frekuensi Kemunculan Berita tentang KPU Bandar Lampung Terkait Kasus Kelebihan Pencetakan Surat Suara



Sumber : data olahan peneliti dari *Lampung Post* dan *Lampung Ekspres*

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri tertentu yang akan diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan

<sup>36</sup> Martono. *Op.cit.*, hal 66.

menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Hal ini berarti bahwa peneliti sudah melakukan pengumpulan terhadap berita seputar pemberitaan KPU Bandar Lampung.

Peneliti melakukan perincian tentang pemberitaan KPU Bandar Lampung terkait dengan kasus skandal surat suara pada Harian Lampung Post. Peneliti menemukan 31 berita seputar pemberitaan KPU Bandar Lampung periode Mei 2010 sampai Juni 2010. Total berita ini terbagi atas 15 berita pada bulan Mei 2010 dan 16 berita yang ditemukan pada bulan Juni 2010. Penelitian ini akan menggunakan *total sampling*, yaitu jumlah sampel berita sama dengan jumlah populasi yang ada. Kemudian peneliti akan menggunakan populasi yang ada yaitu 31 berita tersebut sebagai sampel dari surat kabar Harian Lampung Post.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data dapat membantu penelitian agar mendapat hasil penelitian yang maksimal. Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini :

##### a) Data *intercoder* atau *coding sheet*

Data ini berisikan pertanyaan yang dibuat berdasarkan unit analisis dari variabel penelitian. Pertanyaan ini kemudian direspon oleh dua pengkoder dalam bentuk pilihan jawaban. Kategorisasi diturunkan dari unit analisis yang didapatkan dari dua dimensi berdasarkan rumusan Komisi Kebebasan Pers sebagai ukuran pelaksanaan bagi kegiatan jurnalistik, seperti yang tercantum pada kerangka unit analisis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan diolah secara

kuantitatif dengan memperhatikan dan mencatat frekuensi kemunculan unit analisis. Data tersebut dikelompokkan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk menganalisa data.

b) Dokumentasi berita

Data ini dilakukan dengan mengumpulkan berita-berita dari Harian Umum Lampung Post seputar pemberitaan KPU Bandar Lampung terkait dengan kasus kelebihan pencetakan surat suara pada periode bulan Mei 2010 sampai dengan Juni 2010.

c) Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan berbagai konsep yang akan digunakan dalam proses penelitian. Studi pustaka juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya analisis hasil penelitian, misalnya melalui buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, atau bentuk penelitian lainnya.

## 5. Pengkodean

Dalam penelitian ini, pengkodean digunakan untuk menganalisis dan mengukur isi berita mengenai KPU Bandar Lampung yang terkait dengan skandal surat suara pada Harian Lampung Post periode Mei 2010 sampai dengan Juni 2010. Pengkodean dilakukan untuk menghindari bias dalam penelitian dan tetap memiliki kredibilitas, kepercayaan dan obyektivitas. Lebih lanjut peneliti akan memilih dua pengkodean yang dianggap mempunyai minat dan kemampuan terhadap topik penelitian yaitu Ahta Prayinda sebagai pengkodean I dan Veronika Kresti Juniati sebagai pengkodean II.

Pada kedua pengkoding tersebut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan definisi dan batasan-batasan dalam unit analisis dan kategorisasi yang berkaitan dengan penelitian sehingga akan mempermudah pengkodingan. Selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang obyektif dan reliabel.

#### 6. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengandung arti bahwa alat ukur tersebut stabil (tidak berubah-ubah), dapat diandalkan (*dependable*), dan tetap atau konsisten<sup>37</sup>. Alat ukur tersebut akan disebut reliabel apabila dapat secara konsisten memberikan hasil yang sama terhadap gejala yang sama, meskipun digunakan berulang kali oleh peneliti yang lainnya.

Uji reliabilitas dilakukan agar hasil yang diperoleh objektif dan reliabel. Tahap selanjutnya, peneliti melakukan *pretest* dengan cara mengkoding sampel ke dalam kategorisasi. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan dua orang yang bertindak sebagai pengkoding atau *intercoder*. Uji reliabilitas dilakukan peneliti untuk melihat konsistensi pengukuran data. Untuk melihat apakah data yang digunakan dapat memenuhi harapan, maka uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh R. Holsty<sup>38</sup> :

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

---

<sup>37</sup> Kriyantono. *op.cit.*, hal 143.

<sup>38</sup> Kriyantono. *Op.cit.*, hal 237.

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh kedua pengkode

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang dikode oleh pengkode pertama dan kedua

Setelah menemukan koefisien reliabilitas, selanjutnya adalah mencari “*index of reliability*” (Pi) rumus yang dikembangkan Scott untuk memperkuat hasil uji reliabilitas. Rumus Scott tersebut yaitu :

$$P_i = \frac{(\% \text{ persetujuan yang nyata} - \% \text{ persetujuan yang diharapkan})}{(1 - \% \text{ persetujuan yang diharapkan})}$$

Hasil uji reliabilitas dinilai memenuhi nilai keterandalan apabila hasilnya lebih dari 0,6 (60%)<sup>39</sup>. Data hasil penelitian akan diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditetapkan melalui lembar koding kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian.

## 7. Analisis Data

Maleong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data<sup>40</sup>. Tahap pertama, peneliti merumuskan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah munculnya protes Panwascam terhadap KPU Bandar Lampung terkait dengan kasus kelebihan pencetakan surat suara dalam proses pelaksanaan Pilkada Bandar Lampung 2010. Tahap kedua yaitu penentuan unit analisis. Unit analisis dalam

---

<sup>39</sup> Birowo, Antonius. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta : Gitanyali, hal 168.

<sup>40</sup> Kriyantono. *op.cit.*, hal 166.

penelitian analisis isi dapat didasarkan pada kegiatan peneliti maupun dari sumber teori yang digunakan.

Tahap selanjutnya adalah penarikan sampel dari populasi. Penelitian ini menggunakan *total sampling*, yaitu jumlah sampel berita sama dengan jumlah populasi yang ada. Ada 31 *item* berita yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari Harian Umum Lampung Post periode Mei 2010 sampai dengan Juni 2010. Dalam tahap analisis data, peneliti “membaca” data melalui proses pengkodean data yang mencakup proses pengaturan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori. Data hasil penelitian diperoleh peneliti dengan mencatat frekuensi kemunculan unit analisis seperti yang tercantum dalam lembar *coding sheet*.